

MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA): SEBUAH PELUANG ATAU ANCAMAN?

(Tinjauan Kritis Terhadap Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Pasar Bebas)

Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A.

Univ. Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo

darwisnasution69@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2015 ini Indonesia dihadapkan dengan terbukanya kerjasama ekonomi antar Negara ASEAN yang tergabung dalam MEA, selain itu Indonesia juga telah menjalin kerjasama perdagangan dengan Jepang (IJEPA), Amerika (CAFTA), dan China (C-AFTA). Dengan dimulainya era perdagangan bebas ini tentunya regulasi yang dibuat oleh pemerintah akan semakin sulit untuk mengontrol laju dari pasar karena aturan yang berlaku tentunya adalah aturan pasar. Dengan demikian, kalau produk unggulan yang dipunyai oleh Indonesia tidak bisa bersaing dan tidak bisa memenuhi standar internasional maka bukan keuntungan lagi yang kita dapat tetapi ancaman akan invasi investasi dari luar negeri dan tersingkirnya produk nasional oleh produk-produk luar negeri hingga bisa berpengaruh terhadap seluruh aspek ekonomi dalam negeri. Untuk menanggulangi hal tersebut maka perlu sekali dicari akar kekuatan ekonomi Indonesia, potensi yang dimiliki Indonesia serta upaya dalam meningkatkan inovasi dari Pemerintah baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah. Dengan demikian era-perdagangan bebas ini tidak lagi menjadi suatu ancaman, tetapi akan menjadi peluang bagi Negara Indonesia untuk bisa menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia.

Kata kunci : perdagangan bebas, Inovasi, pemerintah daerah, investasi asing, UMKM

A. PENDAHULUAN

Perjanjian perdagangan bebas/*Free Trade Agreement* (FTA) dikenal sebagai sarana untuk mencapai integrasi ekonomi antara dua Negara atau lebih untuk mendapatkan banyak manfaat bagi satu sama lain. *Free Trade Agreement* (FTA) ditujukan sebagai kesepakatan untuk membangun sebuah area perdagangan bebas dimana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa. Ada beberapa FTA yang telah ditandatangani oleh Indonesia seperti CAFTA (*Central America Free Trade Agreement*), C-AFTA (*China-Asian Free Trade Agreement*) dimana dalam perjanjian kerjasama dengan China tersebut akan menghilangkan bea masuk produk-produk baik dari China ke Indonesia ataupun sebaliknya. Selain itu Indonesia juga harus menghadapi era-implementasi IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) yaitu mulai Juli 2008. AEC (*Asean Economic Community*) yang akan diterapkan pada 2015 membawa angin segar tentunya bagi pelaku UKM didalam negeri karena AEC memberikan

kesempatan untuk memasuki pasar baru, dan memberikan tantangan bagi produk UKM dalam negeri untuk memperbaiki kualitas mutu produk untuk bersaing di pasar dunia.

Di Indonesia jumlah pelaku UMKM sekitar 57 juta dan 200 ribu koperasi yang memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi di sektor ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan memicu pertumbuhan ekonomi. Data statistik dari kementerian koperasi menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 masih kuat 4,6%, tahun 2011 mencapai 6,5% dan pada 2013 PDB masih mencapai 5,8% dimana pencapaian ini secara signifikan disumbang oleh UKM dan koperasi terhadap PDB 56%.¹

Dalam penerapan *IJEPA*, seyogyanya Indonesia secara berkesinambungan mencermati gerak langkah diplomasi dan strategi ekonomi Jepang ke ASEAN, demikian juga mencermati diplomasi ekonomi China ke ASEAN dalam rangka realisasi *CAFTA* (*China Asean Free Trade Agreement*) mulai 2010.² Jika dihadapkan dengan kenyataan AFTA, Indonesiapun sepertinya masih bisa mampu untuk berkompetisi dalam perdagangan bebas ini, tetapi IJEPA dan CAFTA sudah diterapkan jauh-jauh hari sebelum AFTA dimulai. Hal ini bisa dilihat dengan merebaknya barang China yang berupa barang elektronik, buah bahkan beras, serta ditambah Jepang dengan produk utama yaitu otomotif.

Dalam beberapa kesempatan kunjungan keluar negeri, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dari beberapa Negara seperti China, Rusia dan Negara-negara anggota APEC untuk bisa berinvestasi ke Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjanjikan kemudahan pengurusan perijinan jika para investor tersebut memang berniat berinvestasi ke Indonesia, hal ini tentu mendapat respon yang positif dari Negara-negara tersebut. Hal ini mengisyaratkan akan masuknya banyak investasi maupun produk-produk asing ke dalam negeri, kelemahan daya saing untuk menghadapi kekuatan ekonomi dari Negara maju seperti Jepang, China maupun Korea Selatan tentu akan mengakibatkan kita digempur oleh produk-produk dan investasi asing tanpa bisa menggerakkan atau memunculkan produk-produk kita sendiri (produk dalam negeri). Bukan hanya itu saja, gempuran ini akan merubah pola kehidupan kita lebih konsumtif karena barang-barang dari luar negeri dengan pajak hampir 0% membuat harga jual di dalam negeri akan ikut rendah. Dengan kerendahan harga tersebut maka industri-industri lokal kita akan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan di era-perdagangan bebas ini.

¹ <http://www.seputarukm.com/kemenkop-pengembangan-ukm-dalam-menghadapi-mea/> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.02

² <http://www.antaraneews.com/berita/186931/kerjasama-ekonomi-china-dan-jepang-dengan-asean> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 09.38

Dengan mulai berlakunya perdagangan bebas, maka peran pemerintah untuk membuat regulasi untuk mengatur arus perdagangan perlahan akan mulai hilang dan digantikan dengan aturan pasar. Hal ini merupakan kekhawatiran serius bagi Negara sedang berkembang seperti Indonesia dengan daya saing produk yang rendah untuk bisa minimal bertahan atau bahkan hancur terkena gempuran investasi asing. Dengan melihat latar belakang diatas, tentunya sangat menarik sekali untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan inovasi Pemerintah Daerah secara khusus dalam menghadapi pasar bebas?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjelaskan fenomena pasar bebas dan hubungannya dengan pemerintah daerah, tentu sangat tepat sekali jika menggunakan perspektif liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi dengan tokohnya Adam Smith berpendapat bahwa beberapa elemen pada pemikiran liberal mencakup pemikiran penting bahwa ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Campur tangan politik dan peraturan Negara dianggap tidak ekonomis dan malah menciptakan kemunduran serta memicu timbulnya konflik.³

Kaum ekonomi liberal berasumsi bahwa individu (konsumen, perusahaan, atau wiraswasta individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional serta selalu berusaha memaksimalkan perolehan.⁴ Peran Negara menurut perspektif ini seharusnya sangat terbatas. Banyak bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang berdampak kepada pembatasan pasar sehingga mengakibatkan tidak terjadinya perdagangan yang secara potensial menguntungkan.⁵

Letak pemikiran utama dari ekonomi liberal adalah jika perekonomian pasar dibiarkan sendiri, tentu akan berjalan secara spontan menurut mekanisme/hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Terdapat perdebatan terus menerus didalam perspektif ekonomi liberal terkait dengan seberapa besar campur tangan politik/pemerintahan dalam pasar bebas. Meskipun didalam ekonomi liberal tidak mengakui peran Negara, tetapi juga tidak menafikan ketiadaan peraturan politik, karena dalam kenyataannya pasarpun juga butuh kerangka kerja hukum yang dibangun secara politis sebagai dasar pasar agar berfungsi secara tepat.⁶

³ R.Jackson and G. Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terjemahan dari Introduction to International Relations). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 234-235

⁴ Mochtar Mas'ued. 2008. Ekonomi-Politik Internasional dan pembangunan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 42

⁵ Ibid. Hlm. 44

⁶ Op.Cit. Hlm. 235-236

C. METODOLOGI

Dalam penelitian ini akan menggunakan Penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan datanya. *Library research* ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

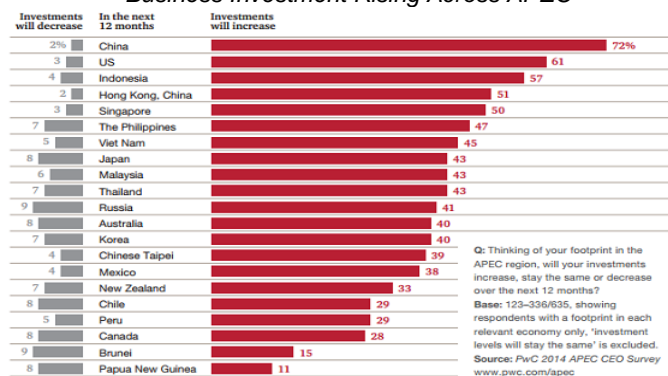
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masuknya Investasi Asing ke Indonesia

Dalam beberapa kesempatan kunjungan keluar negeri, Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dari beberapa Negara seperti China, Rusia dan Negara-negara anggota APEC untuk bisa berinvestasi ke Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjanjikan kemudahan pengurusan perijinan jika para investor tersebut memang berniat berinvestasi ke Indonesia, tawaran ini tentunya mendapatkan respon yang positif dari Negara-negara tersebut.

Menurut survey PwC yang dilakukan terhadap 600 pimpinan perusahaan (CEO) dari seluruh perusahaan di dunia, sebanyak 46% atau bisa dikatakan sebagian besar dari koresponden menganggap prediksi optimis akan pertumbuhan yang signifikan bisa disimak pada negara-negara di Asia Pasifik, dan hasilnya sebanyak 67% justru memiliki rencana untuk meningkatkan investasi di wilayah APEC selama satu tahun ke depan.⁷

Tabel 1
Business Investment Rising Across APEC



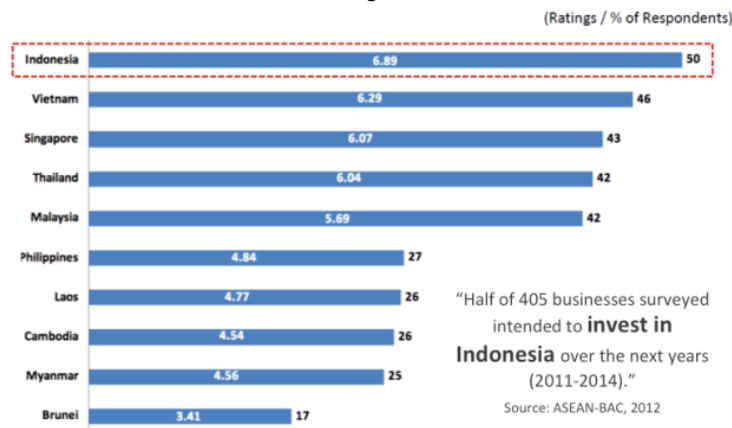
Sumber : www.dailysocial.net⁸

⁷ <http://dailysocial.net/post/investasi-industri-teknologi-indonesia> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.05

⁸ Ibid

Rencana investasi tersebut bakal tersebar di masing-masing 21 negara anggota APEC, di mana Indonesia menjadi tujuan investasi yang paling populer nomor tiga di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat. Rencana investasi ini juga didasarkan oleh Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia.

Tabel 2
Destination Investasi Paling Menarik di ASEAN



Sumber : www.bkpm.go.id⁹

Selain itu, Uni Eropa (UE) juga memiliki minat yang besar untuk berinvestasi di Indonesia dan banyak perusahaan-perusahaan dari UE yang telah hadir di Indonesia: ada lebih dari 700 perusahaan Eropa yang telah memiliki perwakilan di Indonesia yang bergerak dalam berbagai sektor, di mana sektor yang paling diminati adalah manufaktur, migas, pertambangan dan perbankan. UE juga memiliki minat besar untuk berinvestasi dalam sektor infrastruktur di Indonesia.

UE merupakan penanam modal asing terbesar ke-2 di Indonesia setelah Singapura. Diperikan bahwa total investasi UE di Indonesia adalah sebesar US\$ 70 milyar, yang memberikan nilai tambah untuk perekonomian dan meningkatkan teknologi. Potensi untuk meningkatkan investasi masih besar. UE merupakan sumber investasi terbesar di dunia, namun baru sebagian kecil saja dari investasi UE di Asia yang masuk ke Indonesia.¹⁰

Ada banyak peluang investasi di Indonesia, termasuk infrastruktur, perekonomian ramah lingkungan, jasa dan manufaktur. Indonesia telah memperkirakan jumlah kebutuhan infrastrukturnya adalah sebesar US\$ 21 milyar dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Selain itu, berbagai peluang juga ada di sektor ramah lingkungan terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas

⁹ Ibid

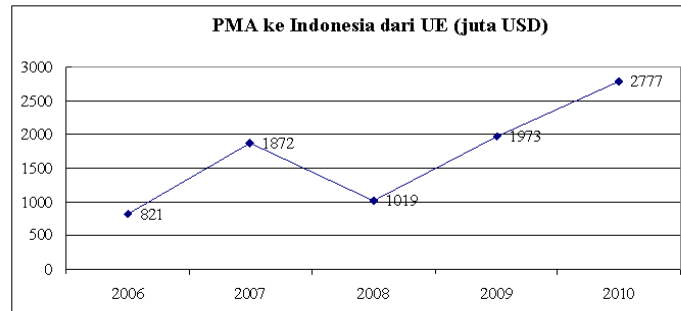
¹⁰ http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/investments/index_id.htm Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.08

rumah kacanya sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumberdayanya sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional.¹¹

Tabel 3
Besaran Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia

Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Singapura	24%	8%	36%	10%	40%	31%
Uni Eropa	9%	31%	10%	13%	18%	17%
Jepang	13%	15%	6%	9%	6%	4%
Korea Selatan	5%	8%	6%	2%	6%	2%

Sumber: BKPM



Sumber: BKPM

Sumber : www.eeas.europa.eu¹²

Dengan melihat data-data diatas maka bisa dilihat bahwa ketertarikan para pemilik modal (investor) untuk menanamkan investasinya di Indonesia sangat besar sekali. Pada tahun 2015 bukan tidak mungkin para investor di kawasan ASEAN akan menyerbu Indonesia demi mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Dengan masuknya para pemilik modal dari luar negeri dengan modal besar tentunya akan menjadi ancaman bagi para pengusaha (UMKM) yang hanya mempunyai modal kecil dari indonesia, dan hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing produk kita di dalam era perdagangan bebas ini.

Membanjirnya perusahaan asing di Indonesia membuat iklim persaingan bisnis semakin memanas, tidak sedikit perusahaan lokal tersudutkan oleh kekuatan perusahaan luar negeri. Menurut Sri Adiningsih (Ekonom dari Universitas Gajah Mada), ada dua penyebab dominasi perusahaan berbendera asing di Indonesia. *Pertama*, karena pemberlakuan kebijakan ekonomi liberal melalui beberapa kesepakatan seperti; WTO, ACFTA dan ASEAN *Economy Community*. Menurutnya, kesepakatan tersebut akan memberikan dua dampak daimana di satu sisi akan menarik banyak investor, tapi di sisi lain justru akan menggerus bisnis domestik, khususnya para pengusaha kecil dan menengah. Misalnya, gempuran barang-barang kosmetik dan furnitur dari Cina, kedai/toko *convience store* asing, produk tekstil serta manufaktur.¹³

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ <http://swa.co.id/business-strategy/dua-penyebab-dominasi-perusahaan-asing-di-indonesia> Diakses tanggal 19 agustus 2015 pukul 09.08

Penyebab kedua karena ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Disini terlihat sekali pemerintah belum menyiapkan secara matang tentang dunia usaha dalam negeri dan regulasi yang pro-lokal. Salah satu caranya dengan proteksi, peraturan yang konsisten antar pusat- daerah dan antar instansi. Jika liberalisasi ekonomi tetap dilakoni tanpa adanya perbaikan regulasi, bisa diprediksi kerugian negara akan semakin besar baik yang terlihat maupun yang tidak. Indonesia hanya akan dijadikan sebagai pasar dan penonton dalam banyak industri. Dampak lainnya adalah besarnya nilai kerugian negara setiap tahun, khususnya ekspor impor jasa yang selalu mengalami defisit karena lebih banyak memakai jasa dari luar negeri melalui kapal, pesawat dan lain-lain. Tahun lalu, katanya, negara mengalami defisit hingga US\$ 10 miliar, sedangkan tahun ini diperkirakan mencapai US\$ 20 miliar.¹⁴

2. Mengakar Kekuatan Ekonomi Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, industri kreatif di Indonesia semakin ramai dengan bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (UKM). Menilik data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2012, jumlah UKM di Indonesia telah mencapai 56,5 juta unit dengan 98,9 persen. Beberapa sektor UKM antara lain, sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, hotel dan restoran, komunikasi, serta perdagangan. Jumlah tersebut telah bertambah hingga sekitar 60 juta UKM pada tahun ini, dan diharapkan akan terus bertambah di masa depan. Apalagi, dengan kian gencarnya berbagai pihak dari dunia bisnis, pemerintahan, hingga akademisi, dalam menyebarkan semangat *entrepreneurship* di kalangan anak-anak muda di dalam negeri.¹⁵

Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

.Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Dampak Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan tingkat *skill*, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.¹⁶

Selain mengedepankan kearifan lokal, UKM juga perlu meningkatkan pelayanan kepada konsumen, karena jika barang-barang impor lebih murah ketimbang barang produksi dalam negeri, tentu UKM akan kesulitan untuk bersaing karena biaya produksi di dalam negeri tinggi. Oleh karena itu, salah satu syarat mutlak untuk menarik minat masyarakat agar mau melirik produk dalam negeri adalah dengan menawarkan produk berkualitas serta pelayanan terbaik kepada konsumen. Meski Indonesia telah memiliki sekitar 60 juta UKM, namun jumlah tersebut masih terbilang kurang. Hal itu disebabkan masih adanya kendala yang menghambat pertumbuhan UKM di negeri ini, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM). Kendala ini pun menjadi tantangan yang harus diatasi oleh UKM dalam menghadapi AFTA. Dari sisi *market*, Indonesia memang memiliki potensi *market* terbesar di ASEAN dan banyak UKM di berbagai daerah relatif sudah memiliki kekuatan dari potensi lokal. Namun dari sisi kualitas SDM, kemampuan UKM untuk beradaptasi dalam menghadapi gempuran produk-produk impor masih menjadi tantangan khusus.

3. Kebijakan Pemerintah Indonesia

Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri nasional, pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan. Selain hal tersebut masing-masing

¹⁶<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> Diakses tanggal 20 agustus 2015 Pukul 08.34

Kementrian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis.

Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha. Negara lain sudah berpikir secara *entrepreneurial* (wirausaha), bagaimana agar pemerintah berjalan dan berfungsi laksana sebuah organisasi *entrepreneurship* yang berorientasi pada hasil. Maka dengan momentum MEA ini sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang cenderung birokratis dengan pola pikir *entrepreneurship* yang lebih taktis, efektif dan efisien. Sebagai contohnya adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 300 triliun (US\$ 30 miliar) yang kurang produktif diarahkan kepada pembiayaan yang lebih produktif misalnya investasi infrastruktur. Menurut data kementerian keuangan, upaya pemerintah dalam menghadapi pasar bebas ini antara lain:¹⁷

- a. *Bidang pendidikan*, Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu sekolah menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan.
- b. *Bidang Perindustrian*, strategi Kementerian Perindustrian menghadapi MEA yaitu dengan strategi *offensive* dan *defensive*. Strategi *offensive* yang dimaksud meliputi penyiapan produk-produk unggulan. Dari pemetaan Kemenperin, produk unggulan dimaksud adalah industri agro seperti kakao, karet, minyak sawit, tekstil dan produk tekstil, alas kaki kulit, mebel, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, otomotif, mesin dan peralatan, serta produk logam, besi, dan baja. Adapun strategi *defensive* dilakukan melalui penyusunan Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk manufaktur.
- c. *Bidang Perdagangan*, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2019. Salah satunya adalah mencanangkan Nawa Cita Kementerian Perdagangan, dengan menetapkan target ekspor sebesar tiga kali lipat selama lima tahun ke depan. Cara tersebut bisa dilakukan dengan membangun 5.000 pasar, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan penggunaan

¹⁷ Ibid

produk dalam negeri. Adapun target ekspor pada 2015 dibidik sebesar US\$192,5 miliar. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi impor untuk meningkatkan ekspor, dan memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada saat ini 65 persen ekspor produk Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah. Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 35 persen komoditas dan 65 persen manufaktur. Oleh karena itu, industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, untuk meningkatkan ekspor sampai 2019.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperkuat produk UMKM dengan membina melalui kemasan (standarisasi produk), sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam pameran berskala internasional. Melalui fasilitas itu, Kementerian Perdagangan berharap, produk serta merek yang dibangun oleh pelaku UMKM di Indonesia dapat dikenal secara global.

Dari sektor pengembangan internal UMKM sendiri, pemerintah mendorong supaya UMKM agar naik kelas menjadi UMKM ber-NPWP. Jika UMKM naik kelas dan memiliki NPWP maka dapat menolong mereka untuk mengajukan pinjaman ke bank, maupun mengikuti sebuah pameran.¹⁸ Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan daya saing melalui percepatan perijinan bagi UMK dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang Percepatan Implementasi.¹⁹ Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya. Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah untuk:²⁰

- a) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- b) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
- c) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
- d) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun lembaga lainnya.

¹⁸ <http://www.ekon.go.id/berita/view/deputi-menko-perekonomian.94.html#.VdPzQvmQ3IU> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.10

¹⁹ Ibid

²⁰ Lihat Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

4. Tantangan dan Hambatan

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan bagi Indonesia dalam menghadapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut di antaranya, *pertama*, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. *Kedua*, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut *Global Competitiveness Index (GCI) 2014*, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. *Ketiga*, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. *Keempat*, keterbatasan pasokan energi. *Kelima*, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.²¹

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menyerap 97,2% tenaga kerja dan berkontribusi 57,6% dari total GDP (*Gross Domestic Product*). Mayoritas UMKM bergerak di sektor pertanian (51,5%) dan perdagangan (28,7%) dan sebagian besar UMKM masih sulit mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha sehingga produktifitas UMKM cenderung masih rendah. Setidaknya terdapat lima faktor penyebab rendahnya produktifitas UMKM, yaitu keterbatasan modal, keterbatasan akses pasar, keterbatasan teknologi, keterbatasan akses informasi, dan keterbatasan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, penting sekali untuk meningkatkan produktifitas dalam dunia usaha agar usaha tersebut memiliki daya saing dan nilai tambah sehingga dapat berkompetisi.²²

b. Bagi Pemerintah Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan hanya di lingkup Negara sebagai pengampu kebijakan, tetapi juga berada pada tingkatan daerah sebagai pelindung UMKM secara langsung. Dengan demikian Pemerintah Daerah tentunya harus lebih aktif dalam rangka mendampingi dan mengembangkan UMKM supaya bisa bersaing di tingkat global.

²¹ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> Diakses tanggal 20 agustus 2015 Pukul 08.34

²² Ibid

Kunci utama keberhasilan suatu usaha berawal dari orang sebagai sang penggerak usaha (*People*). Orang tersebut harus mampu menghasilkan ide cerdas (*Innovation*) yang kemudian direalisasi dengan baik dan sungguh-sungguh (*Execution*). Kedua hal tersebut perlu ditambah dengan jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) yang juga menjadi hal penting agar hasil eksekusi yang ada dapat berubah menjadi keuntungan.²³ Dalam pengembangan UMKM untuk bisa bersaing dalam pasar bebas, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah ada dua hal, antara lain :

- **Standarisasi Produk UMKM dalam peningkatan mutu barang/jasa**

Dengan semakin sedikitnya waktu yang tersisa hingga MEA di jalankan, Bangsa Indonesia harus memiliki daya saing untuk mengambil manfaat dari perkembangan globalisasi. Oleh karenanya, standarisasi dan penilaian kesesuaian menjadi alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan penilaian kesesuaian juga diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan, perdagangan, industri, pertanian, IPTEK, serta lingkungan hidup. Hal ini tentu diperlukan keterlibatan semua pihak termasuk Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan dan penerapan standar produk-produk UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 sudah diatur peran pemerintah daerah dalam perannya memperkuat sektor UMKM hingga bisa bersaing di dalam pasar global. Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 yang terkait peran Pemerintah Daerah dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian:²⁴

- a. Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN (Pasal 10, ayat 5).
- b. SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 21).
- c. Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri

²³ <http://www.ekon.go.id/berita/view/sintesa-peningkatan.931.html#.VdPzTvmQ3IU> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.11

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. (Pasal 24).

- d. Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) (Pasal 25).
- e. BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat (Pasal 54).
- f. BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 56).
- g. Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian (Pasal 58 ayat 2).
- h. Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah (Pasal 59).

- ***Peningkatan SDM bagi kelompok keahlian/profesi***

Dalam rangka persaingan SDM di era-MEA, pembagian 7 (tujuh) kelompok keahlian/profesi yang dapat bekerja lintas negara antara lain: insinyur (*engineering services*), arsitek (*architectural services*), surveyor, layanan medis, dokter gigi, perawat, serta akuntan. Tujuh kelompok keahlian ini kedepan akan bisa masuk hingga berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga perlu sekali untuk segera mempersiapkan bagaimana SDM, tata kelola (*governance*, khususnya dalam bidang infrastruktur), serta kelembagaannya agar daya saing nasional meningkat.²⁵

²⁵ <http://litbang.pu.go.id/balitbang-dorong-penguatan-inovasi-dan-daya-saing-daerah.balitbang.pu.go.id> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.04

Dari data dan fakta Badan Litbang, dari sisi SDM rasio jumlah insinyur Indonesia (199 per 1 juta penduduk) yang ini termasuk masih jauh tertinggal dibanding negara lain di kawasan ASEAN (sebut saja Thailand, Malaysia, dan Singapura dengan rasio 293, 503, dan 570 insinyur per 1 juta penduduk). Selain itu, *logistic performance index* (LPI) pada tahun 2014 juga masih jauh di belakang bahkan dari Vietnam dan Filipina sekalipun. Sementara itu, di sisi lain, *idle capacity infrastruktur* dan indeks kesiapan teknologi masih terbilang belum optimal disamping belum banyaknya pabrik semen yang dibangun di tiap provinsi atau pulau disertai dengan rantai pasok dan konektivitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional.²⁶

E. KESIMPULAN

Didalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar bebas, pemerintah Indonesia tentu telah membangun fondasi yang kokoh dalam perekonomian Indonesia yaitu di penguatan produk UMKM, pembuatan regulasi standarisasi produk dalam negeri dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkesan kurang matang dengan melihat keluarnya peraturan presiden guna mempermudah dalam pengembangan UMKM baru muncul pada tahun 2014 sedangkan pasar bebas mulai dicanangkan adalah pada awal tahun 2000. Kurangnya persiapan ini tentunya akan berdampak kepada daya saing Indonesia terhadap gempuran produk-produk dari Negara-negara lain seperti Korea Selatan, China, Jepang bahkan dari Malaysia, hal ini tentu akan menjadi ancaman yang berarti bagi perekonomian Indonesia dimasa mendatang.

Dalam jangka waktu yang sangat pendek ini tentu pemerintah masih membutuhkan waktu yang cukup banyak lagi untuk meningkatkan kualitas produk dari UMKM agar bisa bersaing di kancah global. Peningkatan kualitas ini tentunya tergantung dari seberapa besar inovasi dan peran dari pemerintah daerah sebagai ujung tombak ekonomi Negara dalam membangun fondasi ekonomi dari sektor paling kecil (UMKM). Dengan kuatnya fondasi yang berupa produk-produk unggulan Indonesia ini akan menjadi pelindung utama ekonomi Indonesia dari gempuran investasi dan produk luar negeri disaat aturan yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk mengontrol laju ekonomi pasar tidak akan berlaku lagi jika pasar bebas sudah dijalankan.

Solusi yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan peningkatan mutu produk UMKM dan lebih meningkatkan promosi sektor pariwisata yang merupakan

²⁶ Ibid

sektor unggulan dari Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat harus terus memberi stimulus kepada pemerintah daerah agar bisa terus mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan merubah kekuatan ekonomi dari basis Negara (sentralistik) kearah penguatan ekonomi berbasis daerah, tentu ekonomi Indonesia akan lebih kuat sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan muncul menjadi raksasa ekonomi seperti China.

F. DAFTAR PUSTAKA

Mas'ood, Mochtar. 2008. Ekonomi-Politik Internasional dan pembangunan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Jackson R. and Sorensen G.. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terjemahan dari *Introduction to International Relations*). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

<http://dailysocial.net/post/investasi-industri-teknologi-indonesia> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.05

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/investments/index_id.htm Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 10.08

<http://litbang.pu.go.id/balitbang-dorong-penguatan-inovasi-dan-daya-saing-daerah.balitbang.pu.go.id> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.04

<http://swa.co.id/business-strategy/dua-penyebab-dominasi-perusahaan-asing-di-indonesia> Diakses tanggal 19 agustus 2015 pukul 09.08

<http://www.antaranews.com/berita/186931/kerjasama-ekonomi-china-dan-jepang-dengan-asean> Diakses tanggal 17 Desember 2014 Pukul 09.38

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> Diakses tanggal 20 agustus 2015 Pukul 08.34

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> Diakses tanggal 20 agustus 2015 Pukul 08.34

<http://www.ekon.go.id/berita/view/deputi-menko-perekonomian.94.html#.VdPzQvmQ3IU> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.10

<http://www.ekon.go.id/berita/view/sintesa-peningkatan.931.html#.VdPzTvmQ3IU> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.11

<http://www.seputarukm.com/kemenkop-pengembangan-ukm-dalam-menghadapi-mea/> Diakses tanggal 19 agustus 2015 Pukul 10.02